

## **PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA SEMEDANG KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK**

**Silva Velagia Olva<sup>1</sup>, Dada Suhaida<sup>2</sup>, Nurhadianto<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Sosial  
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Universitas PGRI Pontianak

Jl. Ampera No.88 Pontianak, Telp (0561) 748219/ 6589855

e-mail: [silvaolva@gmail.com](mailto:silvaolva@gmail.com)<sup>1</sup>, [civic.link@yahoo.com](mailto:civic.link@yahoo.com)<sup>2</sup>, [nadi.nurhadianto@gmail.com](mailto:nadi.nurhadianto@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam membangun infrastruktur di Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang nyata dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Subjek penelitian yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa Semedang, Ketua Rukun Tetangga, dan dua orang masyarakat desa yang tinggal di Desa Semedang. Analisa data yang digunakan yakni wawancara mendalam, lembar observasi dan studi dokumentasi, dengan menerapkan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Semedang dua tahun terakhir ini sudah dilaksanakan dengan cukup optimal. Hasil kerja yang cukup optimal tersebut dapat terlihat dari program kerja kepala desa dalam perbaikan jalan yang sudah rusak di beberapa ruas jalan di lingkungan desa, kemudian perbaikan jembatan penghubung dari desa satu ke desa lain, perbaikan beberapa gedung vasilitas desa seperti gedung PAUD, degung balai desa dengan menggunakan anggaran desa, selain itu warga desa Semedang juga menerima pembagian BLTD yang dibagikan secara merata kepada warga desa yang betul-betul membutuhkan, kemudian adanya program pembagian insentif kepada guru PAUD di Desa Semedang, pembagian insentif kepada kader Posyandu, dan PKK. Selanjutnya, kepala desa Semedang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aparat desa dalam musyawarah desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

**Kata Kunci:** Peran Kepala Desa, Infrastruktur

### **Abstract**

This study aims to determine the role of the village head in building the infrastructure of Semedang Village, Kuala Behe District, Landak Regency. This research method uses a qualitative research method with a descriptive form, with the aim of obtaining real information and descriptions that are in accordance with conditions in the field. The research subjects who are the sources of data in this study are the Head of Semedang Village, the Head of the Neighborhood Association, and two villagers who live in Semedang Village. The data analysis used is in-depth interviews, observation sheets and documentation studies, by applying data triangulation techniques. The results of the study show that the role of the village head in infrastructure development in Semedang Village in the last two years has been carried out quite optimally. The quite optimal work results can be seen from the village head's work program in repairing damaged roads on several roads in the village environment, then repairing connecting bridges from one village to another, repairing several village facility buildings such as PAUD buildings, village halls using the village budget, in addition, Semedang villagers also received BLTD distribution which was distributed evenly to villagers who really needed it, then there was an incentive distribution program for PAUD teachers in Semedang Village, incentive distribution to posyandu cadres, and PKK. Furthermore, the

Semedang village head involved the community in decision-making carried out by village officials in village deliberations to improve village infrastructure development.

**Keywords:** The Role of Village Heads, Infrastructure

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki suatu sistem pemerintahan yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip desentralisasi, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah.

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri (Wildasari, Setiawati, & Mone, 2020). Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan

konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*. Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/desa, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Syahputra, 2022).

Pembangunan infrastruktur desa di seluruh Indonesia saat ini adalah jalan desa, jembatan, pasar desa, tambatan perahu, embung, irigasi, sarana olah raga, penahan tanah, air bersih, MCK, polides, drainase, PAUD, posyandu, dan sumur. Sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan hasil dari musrembang yang ada, karena masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan merupakan prioritas dan kebutuhan dari masyarakat yang ada (Rumegang, G., Sumampouw 2021).

Perencanaan pembangunan desa harus mengikuti sejumlah prinsip serta persyaratan, yang meliputi partisipasi masyarakat, dukungan kepada warga, transparansi, akuntabilitas, selektivitas, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, dan kehati-hatian (Stia & Gazal 2019). Dalam proses perencanaan pembangunan, terdapat faktor-faktor yang menghambat, termasuk kekurangan pendanaan yang berasal dari masyarakat, kurangnya upaya sosialisasi terkait pelaksanaan, serta kegagalan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur masyarakat. Akibat dari hal ini adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur (Putra & Mursyidah, 2023).

Desa Semedang, yang terletak di Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, perkembangan desa ini sangat bergantung pada peran kepala desa sebagai pemimpin lokal yang memiliki otoritas dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Kepala desa memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. *Research GAP* dari penelitian ini adalah kurangnya kajian yang mendalam mengenai strategi yang digunakan oleh kepala desa dalam mengelola dana desa serta bagaimana kepala desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Hermawan, 2020). Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan fokus pada peran kepala desa di Desa Semedang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Semedang. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi kepala desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

PPKn, tetapi juga berkontribusi secara praktis yang signifikan bagi pembangunan infrastruktur desa. Demi terciptanya pembangunan desa yang merata, transparan, dan berkualitas.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Peran Kepala Desa dalam Membangun Infrastruktur Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak”.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas, lengkap, rinci, dan mendalam terkait “Peran Kepala Kepala Desa dalam Membangun Infrastruktur Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak” khususnya dalam hal motivator, fasilitator, dan mobilisator. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2023).

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian apa adanya dengan kondisi di lapangan. Tujuan utamanya adalah menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa dengan teliti. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Metode deskriptif juga mempelajari tentang norma atau standar, sehingga penelitian ini disebut sebagai survei normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif dan membuat perbandingan antar fenomena yang sedang terjadi di lapangan.

Subjek penelitian adalah sumber data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, subyek yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Semedang, Ketua RT, 2 (dua) orang masyarakat Desa Semedang dan beberapa foto-foto hasil program kerja yang sudah dilakukan dijadikan haban kajian dokumentasi sebagai penguat hasil analisa dalam merumuskan kesimpulan nantinya. Namun, dimungkinkan untuk memperoleh data dari sumber selain yang

disebutkan di atas, selama data tersebut dapat mendukung keberhasilan memperoleh informasi terkini dan terinci dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Program Kepala Desa dalam Membangun Infrastruktur Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.**

Program sebagai suatu kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah (Boyle, 2013). Kemudian menurut Areros (2013) bahwa program mempunyai desain atau rancangan. Berdasarkan kedua definisi tersebut di atas maka suatu program tidak lain adalah kegiatan yang terorganisir, mencakup urusan langkah, dan bertujuan untuk memecahkan suatu masalah.

Kepala Desa Semedang dalam menjalankan tugasnya, dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kondisi geografis yang sulit. Namun, dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari masyarakat, berbagai program pembangunan infrastruktur telah berhasil direncanakan dan dilaksanakan. Berikut adalah program-program Desa yang telah berhasil dilaksanakan.

#### 1. Program Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Desa Semedang sudah melaksanakan beberapa tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain meliputi:

a. Administrasi pelaksanaan pembangunan

Administrasi pelaksanaan pembangunan desa merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program pembangunan di tingkat desa. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggungjawab. Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya (Arsjad, 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait dengan administrasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif, Pemerintah Desa Semedang telah sukses mengelola

Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten Landak dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPBRD) dari APBD Kabupaten Landak, Laporan administrasi DD, ADD, dan BHPRD selalu disampaikan tepat waktu begitu kegiatan diselesaikan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Desa Semedang juga tertib dalam menyusun Laporan Kependudukan setiap bulannya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Desa Semedang bahwa, Buku administrasi keuangan Desa berupa buku Kas Umum dan buku kas Pembantu disusun dan diisi dengan rapi. Semua pemasukan maupun pengeluaran kas Desa selalu dicatat dengan tertib oleh Bendahara Desa.

#### b. Pelayanan Masyarakat

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Kemudian dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik

bagi masyarakat. Salah satunya dalam pelayanan administrasi kewarganegaraan seperti pengantar akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kematian, maupun pembuatan akta jual beli tanah (Panjaitan, Dewi, & Angelia, 2019).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Semedang telah mendukung penyelesaian 80% e-KTP bagi warganya. Sebagian warga yang belum memiliki e-KTP disebabkan oleh Pencetakan di Dinas Capil Kabupaten dan akan diusahakan untuk dipenuhi secepatnya dalam tahun 2024. Dengan demikian diharapkan seluruh warga Semedang sudah memiliki e-KTP bagi yang ber hak. Pemerintah Desa Semedang juga memberikan layanan administrasi warga berupa surat pengantar atau surat keterangan kepada warga dan administrasi urusan pernikahan kepada warga setiap tahun.

#### c. Pengembangan Regulasi Desa

Regulasi desa adalah bagian dari hukum daerah yang diperlukan dalam mengatur kehidupan desa. Untuk menyusun regulasi desa, diperlukan pemahaman yang

memadai tentang kondisi desa, serta kebutuhan material dan inmaterial desa, sehingga akan diperoleh sebuah hukum yang mampu membawa kemajuan dan harmonitas desa, agar kemajuan desa dapat dicapai secara dinamis (Teguh & Aprimawati, 2019). Pengembangan regulasi desa adalah proses penyusunan dan penerapan aturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola aspek kehidupan di tingkat desa. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi pemerintahan, pembangunan, hingga sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara disimpulkan bahwa Desa Semedang baru mampu menyusun beberapa Peraturan Desa (Perdes) meliputi Perdes tentang Kewenangan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Perdes tentang RPJMdes, Perdes RKPDesa, Perdes ABPdes, Regulasi lain yang telah disusun oleh Pemerintah Desa meliputi peraturan kepala desa (Perkades) tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Semedang tentang tim penyusun RKPDes, SK Kepala Desa

Semedang tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan SK Kepala Desa Sabung tentang Pengurus RW dan Pengurus RT.

## 2. Program Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu (Chotimah, Widodo, & Handayani, 2019). Pembangunan desa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Amantha, 2021).

Tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Wildasari, Setiawati, & Mone, 2020).

Program bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Semedang menunjukkan fokus yang kuat pada

perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan rehabilitasi jalan antar dusun telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, yang berkontribusi pada kelancaran transportasi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya jalan yang lebih baik, masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih efisien dan membuka peluang usaha baru. Selanjutnya, pembangunan tiang pylon untuk jembatan gantung di Dusun Syahbandar sangat penting untuk menjaga konektivitas antar dusun, terutama di musim hujan. Fondasi yang kokoh dari tiang pylon memastikan jembatan dapat bertahan lama dan meningkatkan keselamatan warga.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 98 Keluarga Penerima Manfaat juga merupakan langkah signifikan dalam meringankan beban ekonomi, membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kombinasi dari ketiga inisiatif ini menciptakan dampak positif yang luas bagi pembangunan desa.

### 3. Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan masyarakat desa adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ini melibatkan berbagai kegiatan yang mendorong kesadaran, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, pasal 26 (1), mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa (Wahyudi, Surya, & Linggi, 2019).

Program dalam bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu bantuan insentif guru PAUD, honor KPM, insentif RT, insentif kader Posyandu dan kader PKK. Program bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Semedang menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pilar pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pembinaan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

dan keterampilan, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa memiliki peran kunci dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga memastikan bahwa semua elemen masyarakat terlibat dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Bantuan insentif untuk guru PAUD dimaksudkan untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini. Program ini tidak hanya menawarkan bantuan keuangan, tetapi juga memasukkan pelatihan yang meningkatkan kemampuan pengajar. Dengan cara ini, perkembangan anak-anak diharapkan lebih optimal, yang akan menghasilkan generasi yang lebih siap untuk menghadapi kesulitan di masa depan.

Honor bagi KPM sangat penting untuk mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan pemberdayaan masyarakat. KPM mendorong pendidikan dan penyuluhan kesehatan, yang merupakan bagian penting dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika mereka merasakan bahwa mereka dihargai. Pemberian insentif kepada Ketua RT juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Insentif ini

memberikan dorongan kepada Ketua RT untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk pelaksanaan program-program pembangunan lainnya.

Kader Posyandu dan Kader PKK juga merupakan komponen vital dalam meningkatkan kesehatan keluarga. Insentif yang diberikan kepada mereka mendukung kinerja dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan gizi, serta pemberdayaan perempuan. Dukungan berupa pelatihan juga memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Secara keseluruhan, program-program pembinaan kemasyarakatan ini merupakan strategi efektif dalam mendorong partisipasi aktif warga Desa Semedang. Dengan dukungan yang memadai, baik dari segi insentif maupun pelatihan, masyarakat diharapkan dapat berdaya dan berperan aktif dalam pembangunan desa. Inisiatif ini tidak hanya mendukung pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Keberlanjutan program ini akan menjadi kunci dalam menciptakan

dampak jangka panjang yang positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

### **Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.**

Pelaksanaan ialah peringkat di mana sesuatu dasar itu dijalankan secara optimum dan dapat mencapai objektif dasar itu sendiri (Murba, 2017). Kemudian pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan sehingga dibutuhkan suatu rangkaian usaha secara sadar dilakukan. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi (Simbolon, et al., 2021).

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah proses penyediaan dan pengembangan fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Semedang, masyarakat merasa lebih lega melihat kondisi infrastruktur yang saat ini telah jauh lebih baik dan memberikan kemudahan akses dalam menunjang perekonomian. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan (Todaro & Smith, 2011) bahwa infrastruktur yang memadai adalah salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Pembangunan jalan dan jembatan yang diuraikan dalam penelitian di Desa Semedang, misalnya, adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur fisik dapat meningkatkan aksesibilitas, mempercepat distribusi hasil panen, dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat setempat. Dan juga pelaksanaan kebijakan publik (dalam hal ini pembangunan infrastruktur) adalah fase kritis dalam siklus kebijakan publik. Seperti yang disinggung dalam penelitian, implementasi yang efektif menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Murba (2017) bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Hasil penelitian selanjutnya ditemukan bahwa Kepala Desa Semedang melibatkan masyarakat dalam pengambilan

keputusan yang dilakukan oleh aparat desa dalam musyawarah desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, sebelum melakukan perbaikan dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah tersebut sehingga masyarakat dapat meyalurkan ide atau menyalurkan pendapat tentang apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

Dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan merupakan bentuk nyata dari partisipasi warga negara yang bertanggung jawab. Teori Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pentingnya warga negara memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban mereka, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam konteks Desa Sumedang, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan proses perencanaan pembangunan mencerminkan implementasi nilai-nilai ini. John Dewey mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan pada pengembangan kemampuan kritis dan partisipatif warga negara. Musyawarah desa yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan adalah

praktik efektif dari Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat lokal (Dewey, 1938).

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma barunya mengembangkan pendidikan demokrasi mengembangkan tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civil intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*) (Supriadi, 2012). Dengan demikian dalam sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa, kepala desa berperan dalam Kepala desa berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan warga, menciptakan ruang bagi dialog terbuka tentang isu-isu penting yang mempengaruhi masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur yang mendesak, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

*Civic participation* merupakan kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara yang dilakukan secara sadar dan tanggung jawab. Partisipasi dalam hal ini adalah mampu memberikan peran dan kontribusi terhadap perubahan sosial kearah masyarakat yang lebih baik (Fauzi, 2016). Dengan demikian kaitannya dengan

fokus penelitian tentang pelaksanaan pembangunan yaitu Kepala desa dapat mendorong *civic participation* dengan melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Dengan mengadakan forum diskusi atau musyawarah desa, kepala desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dalam hal ini *civic participation* dalam peran kepala desa dan masyarakat dapat bertanggung jawab dalam pemerintahan desa.

*Civic responsibility* merupakan tindakan dan sikap yang terkait tanggung jawab sipil sebagai wujud partisipasi secara sukarela (Halimah & Nurul, 2020). Ini mencakup berbagai tindakan dan sikap yang mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. Tanggungjawab ini tidak hanya terkait dengan kewajiban hukum atau kewajiban negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif secara sukarela dalam proses demokrasi, kesejahteraan sosial, dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama. Peran kepala desa dalam *civic responsibility* adalah dalam membangun masyarakat yang aktif, adil, dan berkelanjutan. Kepala desa bukan hanya sebagai pengelola pemerintahan di tingkat desa, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi masyarakat

dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan melibatkan warga dalam kegiatan sosial, menjaga keadilan, dan memimpin dengan integritas, kepala desa membantu menciptakan kondisi di mana tanggung jawab sipil dihargai dan diterapkan untuk kebaikan bersama.

Pembangunan infrastruktur desa dapat diketahui sudah berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagai berikut:

#### 1. Program Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Desa Semedang menunjukkan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang administrasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Administrasi pembangunan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Semedang berhasil mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan transparan dan akuntabel, yang tercermin dalam laporan yang disampaikan tepat waktu. Keberadaan aparat desa yang kompeten sangat krusial dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah di tingkat lokal. Selain itu, pelayanan masyarakat

juga menjadi fokus utama, di mana pemerintah desa telah mendukung penyelesaian e-KTP hingga 80% dan menyediakan layanan administrasi seperti pengantar akta dan urusan pernikahan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan akses layanan bagi warga, tetapi juga membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

## 2. Program Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa Semedang telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang signifikan, yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, rehabilitasi dan peningkatan jalan antar dusun berhasil meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, memungkinkan transportasi barang dan jasa menjadi lebih efisien. Proyek ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi desa dengan membuka peluang usaha baru dan memperlancar distribusi hasil pertanian. *Kedua*, pembangunan tiang pylon untuk jembatan gantung di Dusun Syahbandar merupakan langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur, terutama saat musim hujan. Jembatan ini penting untuk menghubungkan dusun-dusun,

dan fondasi yang kokoh meningkatkan keselamatan warga. *Ketiga*, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 98 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga menunjukkan upaya pemerintah desa dalam meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu. Program ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama di masa-masa sulit. Melalui berbagai inisiatif ini, Desa Semedang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya.

## 3. Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Desa Semedang menjalankan empat program utama dalam bidang pembinaan kemasyarakatan, yaitu bantuan insentif untuk guru PAUD, honor untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), insentif untuk Ketua RT, serta insentif untuk kader Posyandu dan kader PKK. Program bantuan insentif bagi guru PAUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan memperkuat pembinaan masyarakat secara keseluruhan. Selain insentif finansial, program ini juga mencakup pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan metode pengajaran,

yang diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak.

Honor yang diberikan kepada KPM bertujuan untuk memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat, seperti penyuluhan kesehatan dan pendidikan. KPM berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan desa melalui edukasi mengenai kesehatan dan ekonomi. Pemberian insentif kepada Ketua RT juga menunjukkan dampak positif, memperkuat rasa penghargaan dan dukungan. Ini membuat Ketua RT lebih bersemangat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, yang merupakan aspek penting bagi pembangunan berkelanjutan. Kader Posyandu dan kader PKK, yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga, juga mendapat insentif. Insentif ini tidak hanya meningkatkan semangat mereka dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyediakan pelatihan untuk memperbaiki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Secara keseluruhan, program-program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di Desa Semedang.

## **SIMPULAN**

Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Semedang sudah dilaksanakan. Perangkat desa sudah menunjukkan dampak positif. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari lancarnya transportasi antar dusun. Salah satu contohnya transportasi dari Dusun Bangkup yang sudah lancar. Pembagian BLTD yang dilakukan secara merata kepada warga desa yang membutuhkan. Pembagian insentif kepada guru PAUD, pembagian insentif juga diberikan kepada kader Posyandu, dan PKK. Kepala Desa Semedang juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aparat desa dalam musyawarah desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, kegiatan musyawarah ini dilakukan sebelum perbaikan dalam hal pembangunan seluruh infrastruktur desa dilakukan, sehingga Masyarakat desa merasa dilibatkan dalam musyawarah untuk mufakat, sehingga masyarakat dapat meyalurkan ide maupun pendapat tentang apa yang dibutuhkan Masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan

- Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Kabupaten Talaud. *Governance*, 1(2).
- Areros, W. A. (2013). Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. *Sosiohumaniora*, 15(3), 312-318.
- Syahputra, A. (2022). Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur “ Desa Pakning Asal ” Kabupaten Bengkalis. *Institutional Repository UIN Suska Riau*, 1–74. <https://repository.uin-suska.ac.id/14721/>
- Arsjad, F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Journal of Public Administration Studies*.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 105.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, I. (2016). Peran Kepemimpinan Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UPI Dalam Meningkatkan Civic Participation Mahasiswa. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Teguh, P., & Aprimawati, B. (2019). Penyusunan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Konstituen*.
- Hermawan. (2020). Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap Peran Kepala Desa. *Pembangunan Daerah*.
- Wildasari, Setiawati, B., & Mone, A. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *KIMAP*, 498.
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat . *Perspektif*.
- Putra, K. W., & Mursyidah, L. (2023). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *ournal of Governance and Local Polit*.
- Rumegang, G., Kaawoan, J. E., & Sumampow, I. (2021). Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastuktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan
- Wahyudi, P., Surya, I., & Linggi, R. K. (2019). Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau

Pulung Kabupaten Kutai Timur.  
*eJournal Ilmu Pemerintahan.*